

**KETERSEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PADA  
KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS DI KELURAHAN  
BINANGA KABUPATEN MAMUJU–SULAWESI BARAT**

*THE AVAILABILITY OF INFRASTRUCTURE AT  
PRIORITIZED HOUSING AREA AT BINANGA, MAMUJU  
DISTRICT, WEST SULAWESI*

**A I S Y A H**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**KETERSEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PADA  
KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS DI KELURAHAN  
BINANGA KABUPATEN MAMUJU–SULAWESI BARAT**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi  
Teknik Perencanaan Prasarana

Disusun dan diajukan oleh

A I S Y A H

kepada

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

# TESIS

## KETERSEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PADA KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS DI KELURAHAN BINANGA KABUPATEN MAMUJU-SULAWESI BARAT

Disusun dan diajukan oleh

AISYAH

Nomor Pokok P2800210009

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 11 April 2013

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui  
Komisi Penasihat,**

---

**Prof. DR. H. Muhammad Tahir Kasnawi, SU**

Ketua

Ketua Program Studi

Teknik Perencanaan Prasarana

---

**Prof. Dr. Ir. H. M. Ramli Rahim, M. Eng**

---

**Dr. Ir. Ria Wikantari, M. Arch**

Anggota

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Hasanuddin

---

**Prof. Dr. Ir. Mursalim**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aisyah  
Nomor mahasiswa : P2800210009  
Program Studi : Teknik Perencanaan Prasarana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2013

Yang menyatakan

Aisyah

## PRAKATA

Alhamdulillahirabbil 'Aalamiin penulis haturkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala serta shalawat dan salam atas Junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam dengan selesainya tesis ini.

Gagasan yang melatar belakangi rumusan permasalahan ini timbul dari hasil pengamatan penulis terhadap kondisi prasarana dan sarana permukiman penduduk di kelurahan Binanga yang terletak pada pusat kota namun dengan tingkat ketersediaan prasarana dan sarana permukiman yang belum seluruhnya memadai sedangkan kota terus mengalami kemajuan dan otomatis prasarana dan sarana dituntut untuk mengikuti perkembangan kota.

Meskipun terdapat kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, namun berkat usaha dan bantuan dari berbagai pihak, namun akhirnya tesis ini selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan hormat dan tulus ingin menyampaikan terima kasih kepada Prof.Dr.H.M.Tahir Kasnawi, SU sebagai Ketua Komisi Penasihat, dan Dr. Ir. Ria Wikantari, M. Arch sebagai Anggota Komisi Penasihat, serta terima kasih kepada seluruh Dosen Penguji atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis sejak dari awal penelitian ini sampai dengan penulisan tesis ini masukannya. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga, kerabat dan rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam rangka pengumpulan data dan informasi, dan yang terakhir ucapan terima kasih juga disampaikan

kepada keluarga Besar Majelis At-Thahiriyah dan Keluarga Besar Majelis Rasulullah SAW atas doa dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Makassar, Mei 2013

Aisyah

## ABSTRAK

AI SYAH. *Ketersediaan Prasarana dan Sarana pada Kawasan Permukiman Prioritas di Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat* (dibimbing oleh Muhammad Tahir Kasnawi dan Ria Wikantari).

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji ketersediaan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan permukiman serta mengetahui kebutuhan prasarana dan sarana untuk proyeksi lima tahun mendatang terkait rencana pemerintah membangun kawasan permukiman prioritas pada kawasan permukiman di Kelurahan Binanga.

Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi secara langsung, kuesioner, dan dokumen data, serta dokumen dari berbagai laporan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prasarannya telah memadai, yaitu jalan lokal yang telah mengalami pengerasan sebesar 70%, penduduk yang telah menggunakan sambungan PDAM sebesar 50%, dan kepemilikan jamban dan prasarana MCK sebesar 70% juga. Prasarana yang belum memadai adalah jalan lingkungan yang mengalami pengerasan baru 40%, tidak tersedianya tempat sampah, drainase primer tidak berfungsi maksimal, minimnya drainase sekunder, dan tidak tersedianya drainase tersier. Sementara ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan ekonomi sudah memadai karena masyarakat telah terlayani secara baik dengan berbagai sarana tersebut.

Kata kunci: ketersediaan prasarana dan sarana, permukiman prioritas kawasan pengembangan.

## ABSTRACT

AISYAH. *The Availability of Infrastructure at Prioritized Housing Area at Binanga, Mamuju District, West Sulawesi* (Supervised by Muhammad Tahir Kasnawi and Ria Wikantari)

This study aims to find out and analyse the availability of environment infrastructure in housing area; and to find out the needs of environment infrastructure in the next 5 years in relation to the government plan to build prioritized housing area at Binanga.

The research was conducted at Binanga, Mamuju subdistrict, Mamuju District, West Sulawesi province. The data were collected by using direct observations, questionnaires, data documentation, and the documentation of reports related to the research problems.

The results reveal the availability of good infrastructure. It can be seen that 70% of local roads have been improved, 50% of the community have used clean water connection provided by PDAM (Local Water Company), and the ownership of water closet and washing facilities has reached 70%. There are also good facilities of education, health service, prayer centre, and economic centre. However, only 40% of neighbourhood paths have been improved, and trash containers are not available. Primary drainage has not shown maximum function, secondary drainage is limited, and there is no any tertiary drainage. Therefore, it is still necessary to improve neighbourhood paths, provide trash containers, renew primary drainage, build secondary drainage in the neighbourhood environment, and build tertiary drainage in each house in the housing area.

Keywords: availability of infrastructure, prioritized housing, development area.

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>PRAKATA</b>	v
<b>ABSTRAK</b>	vii
<b><i>ABSTRACT</i></b>	viii
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL</b>	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xvii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Prasarana Lingkungan Permukiman	10
B. Fungsi dan Tujuan Pembangunan Prasarana	12
C. Komponen Dasar Prasarana Lingkungan Permukiman	13
D. Pengertian Sarana Permukiman	16
E. Kawasan Permukiman dan Perumahan	16
F. Kawasan Permukiman Prioritas	19

G. Prasarana Permukiman	21
1. Jalan	21
a. Definisi Jalan	21
b. Klasifikasi Jenis Jalan Lingkungan Permukiman	22
2. Air Bersih	23
a. Pengertian Air Bersih	23
b. Sumber Air Bersih	24
c. Standar Pelayanan Minimal Air Bersih	24
3. Jaringan Drainase	25
a. Pengertian Drainase	25
b. Fungsi dan Kegunaan Saluran Drainase	25
c. Jenis-Jenis Drainase	25
d. Sistem Penyediaan Jaringan Drainase	27
e. Standar dan Kebijakan Jaringan Drainase	27
4. Sanitasi(MCK dan persampahan)	28
a. MCK(Mandi, Cuci, Kakus)	28
b. Persampahan	31
H. Sarana Lingkungan Permukiman	34
1. Sarana Pendidikan	34
a. Taman Kanak-Kanak	34
b. Sekolah Dasar	35
c. Sekolah Menengah Pertama(SMP)	35
d. Sekolah Menengah Atas(SMA)	35

2. Sarana Kesehatan	37
a. Balai Pengobatan	37
b. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak(BKIA)+Rumah Bersalin	37
c. Puskesmas Pembantu(PUSTU)	37
d. Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas)	38
e. Poliklinik	38
f. Rumah Sakit Wilayah	38
g. Tempat Praktek Dokter	39
h. Apotik	39
3. Sarana Perekonomian	39
a. Warung	39
b. Pertokoan	39
c. Pusat Perbelanjaan Kawasan 30.000 Penduduk	40
d. Pusat Perbelanjaan dan Niaga Kasawan 120.000 Penduduk	40
4. Sarana Peribadahan	40
I. Penelitian Terkait	41
J. Kerangka Pikir Penelitian	42
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	46
C. Waktu Penelitian	51
D. Populasi dan Sampel	51

1. Populasi	51
2. Sampel	51
E. Teknik Pengumpulan Data	53
1. Observasi dan Pengukuran	53
2. Interview(wawancara)	53
3. Kuesioner(angket)	53
4. Dokumentasi	54
F. Sumber Data Penelitian	54
1. Data Primer	54
2. Data Sekunder	55
G. Teknik Analisis Data	56
H. Variabel Penelitian	59
I. Definisi Operasional	62
1. Prasarana	62
2. Sarana	65
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
B. Keadaan Alam dan Potensi Kabupaten Mamuju	68
C. Kondisi Permukiman di Lokasi Penelitian	69
D. Ketersediaan dan kebutuhan Prasarana	70
1. Prasarana Jalan	70
a. Ketersediaan Prasarana Jalan	70
b. Kebutuhan Prasarana Jalan	74

2. Prasarana Air Bersih	75
a. Ketersediaan Prasarana Air Bersih	75
b. Kebutuhan Prasarana Air Bersih	75
3. Prasarana Drainase	79
a. Ketersediaan Prasarana Drainase	79
b. Kebutuhan Prasarana Drainase	81
4. Sanitasi(MCK dan Sampah)	81
a. Ketersediaan Prasarana MCK	81
b. Kebutuhan Prasarana MCK	84
c. Ketersediaan Prasarana Sampah	85
d. Kebutuhan Prasarana Sampah	87
E. Karakteristik Lokasi Penelitian	87
1. Sarana Pendidikan	87
a. Ketersediaan Sarana Pendidikan	88
b. Kebutuhan Sarana Pendidikan	88
2. Sarana Kesehatan	89
a. Ketersediaan Sarana Kesehatan	89
b. Kebutuhan Sarana Kesehatan	89
3. Sarana Ekonomi	90
a. Ketersediaan Sarana Ekonomi	90
b. Kebutuhan sarana Ekonomi	91
4. Sarana Peribadahan	91
a. Ketersediaan Sarana Peribadahan	92

b. Kebutuhan Sarana Peribadahan	92
F. Rekapitulasi Hasil penelitian	93
1. Prasarana	93
a. Prasarana Jalan	93
b. Prasarana Air bersih	94
c. Prasarana Drainase	94
d. Prasarana MCK dan Sampah	95
2. Sarana	95
a. Sarana Pendidikan	96
b. Sarana Kesehatan	96
c. Sarana Ekonomi	97
d. Sarana Peribadahan	97
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	<b>halaman</b>
Tabel 1. Tipikal kuantitas dan karakteristik limbah rumah tangga	29
Tabel 2. Jumlah pengguna MCK dan bilik yang diperlukan	30
Tabel 3. Pedoman standar pelayanan minimal(Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah)	36
Tabel 4. Nama lingkungan dan kelurahan di kecamatan Mamuju kota kabupaten Mamuju	46
Tabel 5. Variabel prasarana	61
Tabel 6. Variabel sarana	61
Tabel 7. Perbandingan antara panjang jalan dengan Standar Pelayanan Minimal(SPM)	72
Tabel 8. Perbandingan antara lebar jalan rata-rata dengan Standar Pelayanan Minimal(SPM)	73
Tabel 9. Perbandingan antara panjang jalan perkerasan dengan kondisi jalan yang ada	74
Tabel 10. Sumber air bersih di Kasiwa Timur	76
Tabel 11. Kontinuitas aliran air bersih PDAM	76
Tabel 12. Tanggapan responden akan kuantitas air bersih	77
Tabel 13. Ketersediaan prasarana air bersih terhadap kebutuhan	78
Tabel 14. Kepemilikan jamban pribadi	83
Tabel 15. Tanggapan responden terhadap pembuangan tinja	84
Tabel 16. Lokasi tempat pembuangan sampah	86
Tabel 17. Waktu bagi pejalan kaki untuk mencapai sarana pendidikan	88

Tabel 18. Waktu bagi pejalan kaki untuk mencapai sarana kesehatan	90
Tabel 19. Waktu bagi pejalan kaki untuk mencapai sarana ekonomi	91
Tabel 20. Waktu bagi pejalan kaki untuk mencapai sarana peribadahan	92
Tabel 21. Tabel rekapitulasi prasarana	98
Tabel 22. Tabel rekapitulasi sarana	99

## DAFTAR GAMBAR

	<b>halaman</b>
Gambar 1. Kerangka pikir penelitian	44
Gambar 2. Lokasi penelitian di kelurahan Binanga	48
Gambar 3. Lingkungan RT.01 Kasiwa Timur kelurahan Binanga	49
Gambar 4. Lingkungan RT.01 Kasiwa Timur kelurahan Binanga	50
Gambar 5. Jalan lokal	70
Gambar 6. Jalan lingkungan permukiman Kasiwa Timur	71
Gambar 7. Sambungan air bersih PDAM	75
Gambar 8. Genangan air pembuangan di Kasiwa Timur	79
Gambar 9. Kondisi drainase tersier di Kasiwa Timur	80
Gambar 10. Kondisi drainase sekunder di Kasiwa Timur	80
Gambar 11. Kondisi drainase primer di Kasiwa Timur	80
Gambar 12. Kondisi jamban warga	82
Gambar 13. WC umum	83
Gambar 14. Kondisi sampah di Kasiwa Timur	86

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kota sebagai pusat permukiman secara umum mempunyai peran penting dalam memberi pelayanan di berbagai bidang kehidupan bagi penduduknya dan daerah sekitarnya. Kota merupakan pusat pelayanan jasa, produksi, distribusi serta menjadi simpul transportasi bagi daerah permukiman dan produksi sekitarnya. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan kota maka mendorong kawasan lainnya untuk mengikutinya tidak terkecuali kawasan permukiman. Kawasan permukiman yang mendominasi kawasan perkotaan akan membangkitkan kegiatan bahkan mengarahkan pembangunan kawasan lainnya sehingga mempengaruhi arah pembangunan kota yang bersangkutan.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang juga mempunyai peran sangat strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi mendatang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Perumahan dan permukiman seringkali mengalami permasalahan yang kompleks yang membutuhkan penanganan dan perhatian khusus. Permasalahan perumahan dan permukiman tidak dapat dipandang sebagai permasalahan fungsional dan fisik semata, tetapi lebih kompleks

lagi sebagai permasalahan yang berkaitan dengan dimensi kehidupan bermasyarakat yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, teknologi, ekologi maupun politik.

Kawasan permukiman pada umumnya adalah kawasan inti yang seringkali mendominasi dalam suatu kawasan perkotaan. Kawasan ini menjadi pusat berawalnya kegiatan yang keberadaannya seringkali mengikuti perkembangan kawasan lainnya. Setiap kawasan fungsional yang dikembangkan akan membutuhkan kawasan permukiman untuk mengakomodasi perkembangan masyarakat yang beraktifitas di dalam kawasan yang dikembangkan tersebut. Perkembangan kawasan tersebut pada dasarnya dapat digolongkan kedalam dua jenis, yaitu:

1. Permukiman yang berkembang karena faktor historis.
2. Permukiman yang berkembang karena diciptakan.

Permukiman jenis yang pertama adalah permukiman yang telah berkembang sebelum suatu wilayah atau kota berkembang menjadi sangat pesat. Perkembangan jenis ini umumnya ditengarai sebagai titik awal perkembangan suatu wilayah atau kota yang berkembang secara alami pada lokasi-lokasi yang dekat dengan sumber daya alam yang digunakan manusia untuk hidup seperti sungai dan lahan pertanian yang subur. Berkaitan dengan hal tersebut, umumnya permukiman jenis ini berkembang secara sporadis di sekitar sumber daya alam tersebut.

Permukiman jenis kedua adalah permukiman yang berkembang karena diciptakan oleh pengembang. Permukiman ini dikembangkan pada

lokasi-lokasi dan umumnya berada di pinggiran kota untuk mengakomodir pertumbuhan pusat-pusat baru di pinggiran kota tersebut. Permukiman jenis kedua ini juga dikembangkan untuk pemeratakan perkembangan wilayah atau kota serta memenuhi kebutuhan perumahan penduduk. Sehubungan dengan kedua jenis permukiman di atas, maka dalam suatu wilayah atau kota, perkembangan kawasan permukiman sangat rentan terhadap adanya perkembangan yang tidak terkendali. Permintaan perumahan yang cukup tinggi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan pembangunan kawasan permukiman yang memadai mengakibatkan perkembangan kawasan permukiman ini menjadi salah satu penyebab terjadinya fenomena perkampungan kumuh (*urban sprawl*).

Beberapa persoalan pembangunan muncul di kawasan permukiman, antara lain; tumbuhnya perumahan liar dan permukiman kumuh, yang dapat menjadi salah satu penyebab meningkatnya tingkat kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, angka kriminalitas, rendahnya kondisi kesehatan masyarakat, dan bertambahnya penduduk miskin di kawasan perkotaan. Masalah permukiman juga dapat ditimbulkan oleh Peningkatan jumlah penduduk yang begitu cepat. Masalah permukiman lebih terasa di daerah perkotaan daripada di daerah perdesaan. Tingkat pertumbuhan penduduk kota yang lebih cepat dan tidak seimbang dengan ketersediaan lahan di perkotaan mengakibatkan tekanan penggunaan lahan kota. Salah satu contoh yaitu penggunaan lahan yang kurang atau tidak layak huni untuk daerah permukiman sehingga akan menimbulkan

masalah tata ruang/lingkungan, yaitu semakin pesatnya permukiman kumuh yang bermunculan di perkotaan. Masalah permukiman perkotaan di Indonesia pada saat ini di antaranya adalah tempat tinggal serta lingkungan yang pada umumnya jauh dari syarat-syarat kehidupan keluarga yang layak. Berkaitan dengan banyaknya pada perkembangan kawasan permukiman, maka kawasan permukiman perlu dilakukan penanganan secara khusus atau prioritas.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju, perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Mamuju pada akhir tahun rencana 2031 mencapai angka 1.134.040 jiwa. Dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,37% dalam periode 5 tahunan. Diperkirakan tingkat kepadatan penduduk sebesar 142 jiwa/Km<sup>2</sup>. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka di rumuskan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman yang diharapkan dapat mendukung perwujudan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju secara keseluruhan. Meskipun demikian, kepentingan untuk dapat mempertahankan fungsi lindung serta daya dukung lingkungan tetap menjadi dasar pertimbangan.

Kawasan permukiman prioritas adalah bagian dari suatu wilayah administrasi pemerintahan yang memiliki karakteristik/persoalan khusus yang menyebabkan kawasan ini perlu diprioritaskan atau diberikan perhatian khusus dalam penanganannya. Kesalahan mengantisipasi pola penanganan dan pemberian prioritas pada kawasan dengan kebutuhan khusus tersebut akan berdampak terhadap proses dan capaian tujuan

pembangunan perkotaan secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Kebijakan Rencana Pembangunan (*Development Plan*) didasarkan pada rencana pemanfaatan ruang, wilayah kabupaten Mamuju yang dibedakan ke dalam empat kawasan, yaitu kawasan perkotaan, perdesaan, pesisir pantai dan laut serta kawasan strategis. Konsekuensi dari adanya perbedaan kawasan tersebut berpengaruh terhadap kegiatan yang berlangsung di kawasan termasuk sistem penyediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman yang dibutuhkan.

Kota Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat mendapat prioritas tinggi untuk dikembangkan. Dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dijelaskan bahwa Kota Mamuju dengan fungsi utama sebagai jasa pelayanan pemerintahan, selain itu juga berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan/perekonomian. Sebagai kota pusat pemerintahan, maka kawasan tersebut perlu didayagunakan secara optimal dan terpadu untuk mendukung perannya sebagai salah satu pusat kegiatan pemerintahan dalam wilayah Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat dalam skala yang lebih luas. Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju adalah pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dengan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas di kabupaten Mamuju.

Kelurahan Binanga merupakan kawasan permukiman lama, jauh sebelum terbentuknya Propinsi Sulawesi Barat (SULBAR). Propinsi SULBAR merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan,

merupakan propinsi ke-33 dan diresmikan sejak 5 Oktober 2004 berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2004, dengan ibukota Provinsi adalah Kota Mamuju. Wilayah Provinsi Sulawesi Barat meliputi 5 Kabupaten yaitu: Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Kabupaten Mamuju memiliki 58 kecamatan, 50 kelurahan dan 393 desa. Sejak lahirnya kabupaten Mamuju yaitu tahun 1959 kelurahan Binanga telah menjadi pusat bermukim dan aktivitas masyarakat serta pemerintahan kabupaten Mamuju.

Lingkungan Kasiwa Timur/Balaninor merupakan 1 dari 3 kawasan yang termasuk dalam rencana pembangunan kawasan permukiman prioritas pemerintah Kabupaten Mamuju khususnya di kelurahan Binanga selain kawasan Kasiwa Tengah dan Tambi. Lingkungan Kasiwa Timur merupakan kawasan kota lama yang letaknya sangat strategis karena terletak pada pusat pelayanan perdagangan yaitu pasar sentral dan pusat pertokoan, namun permukimannya merupakan perkampungan kota yang kumuh. Permukiman di kasiwa Timur kelurahan Binanga memiliki karakteristik hunian yang padat, rata-rata luas kecil, terdapat banyak rumah-rumah non permanen yang tumbuh secara liar dan tidak teratur. Selain itu minimnya prasarana yang ada seperti prasarana jalan yang lingkungan yang sebagian besar belum mengalami perkerasan beton maupun paving blok, ketersediaan sambungan prasarana air bersih yang belum seluruhnya dapat dimiliki oleh masyarakat, keterbatasan

prasarana sanitasi MCK dan persampahan yang sangat memprihatinkan, terlihat sampah yang bertebaran di lahan-lahan kosong dan di kanal sedangkan kawasan permukiman pada lingkungan Kasiwa Timur ini memiliki potensi nilai ekonomis dan atau strategis tinggi yang apabila ditangani dapat meningkatkan nilai kawasan serta memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian wilayah atau kota Mamuju sehingga oleh pemerintah Kabupaten Mamuju dimasukkan dalam rencana pembangunan kawasan permukiman prioritas kabupaten Mamuju.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketersediaan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan permukiman prioritas kasiwa Timur di Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju saat ini?
2. Bagaimana kebutuhan prasarana dan sarana permukiman lingkungan pada kawasan permukiman prioritas kasiwa Timur di Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju hingga 5 tahun mendatang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Terkait dengan Rumusan Masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat ketersediaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman prioritas Kasiwa Timur pada Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju, apakah sudah sesuai dengan standar minimal prasarana dan sarana dasar permukiman, dan
2. Untuk mengetahui tingkat kebutuhan prasarana dan sarana lingkungan permukiman pada kelurahan Binanga kepada pemerintah Kabupaten Mamuju hingga proyeksi kebutuhan hingga 5(lima) tahun mendatang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini secara akademik diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangsih bagi peneliti berikutnya di masa yang akan datang, dan secara umum diharapkan dapat memberi informasi tentang prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang telah dan yang perlu disediakan pada kawasan permukiman prioritas di Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju dan diharapkan dari hasil analisis dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah kabupaten Mamuju dalam penyediaan prasarana dan sarana dan menangani masalah keterbatasan sarana dan prasarana permukiman di Kabupaten Mamuju.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini mencakup lingkup pembahasan, lingkup batasan objek dan lingkup wilayah yang akan diteliti, yaitu:

### **1. Lingkup Pembahasan**

Penelitian ini meneliti ketersediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman prioritas Kelurahan Binanga.

### **2. Lingkup Batasan Objek**

Objek Prasarana yang akan diteliti adalah: jalan, air bersih, sanitasi (sampah dan MCK) dan drainase. Sedangkan Objek sarana yang akan diteliti adalah: sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan peribadahan yang ada di kelurahan Binanga.

### **3. Lingkup Wilayah**

Lingkup wilayah penelitian ini berada di Kelurahan Binanga Kota Mamuju merupakan kawasan kota lama dan permukiman lama. Berdasarkan letak geografisnya merupakan kawasan strategis, dimana terdapat pasar yang menjadi pusat pelayanan perdagangan dan perekonomian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Prasarana Lingkungan Permukiman

Secara umum prasarana lingkungan dikenal sebagai *utilities* dan *amenities* atau disebut juga wisma, marga, suka dan penyempurna. Lebih spesifik lagi, jenis-jenis tersebut adalah fasilitas, sistem jaringan sirkulasi, drainase dan kesehatan lingkungan(Bappenas, 2003).

Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya(Kemenpera).

Menurut Departemen Pekerjaan Umum di dalam buku Pedoman Penyusunan Rencana Fasilitas Pelayanan Masyarakat Permukiman Kota menyatakan bahwa prasarana dasar perkotaan adalah merupakan suatu fasilitas pelayanan prasarana lingkungan perumahan kota yang meliputi komponen jalan lingkungan, jalan setapak, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah/sanitasi, drainase dan pengelolaan sampah rumah tangga yang dibangun untuk menjamin kondisi kesehatan serta meningkatkan sosial dan perekonomian masyarakat.

Sedangkan prasarana atau yang sering disebut infrastruktur adalah merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan

tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai(Jayadinata,1992).

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah mendefinisikan prasarana sebagai suatu bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu ruang yang terbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam mempertahankan kehidupannya.

Pendapat lain berkenaan prasarana menyatakan bahwa prasarana atau infrastruktur merupakan suatu fasilitas fisik suatu kota atau negara yang sering disebut pekerjaan umum. Dengan demikian prasarana kota merupakan suatu fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota yang pada akhirnya akan ikut menentukan perkembangan kota(Grigg,1988).

Menurut SNI 03-1733-2004 V2 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan prasarana lingkungan dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan Permukiman adalah jaringan jalan untuk mobilitas orang dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur, jaringan air bersih, jaringan saluran

pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan, jaringan saluran air hujan untuk drainase dan pencegahan banjir , dengan karakteristik komponen yang berbeda-beda.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa prasarana lingkungan merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan dimana kondisi dan kinerjanya akan berpengaruh pada kelancaran aktifitas masyarakat sebagai pengguna prasarana.

## **B. Fungsi dan Tujuan Pembangunan Prasarana**

Fungsi pembangunan prasarana adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya permukiman dan lingkungan yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan. Untuk memperbaiki dan mengembangkan lingkungan dibutuhkan keseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkat kebutuhan dari masyarakat pengguna dan pemanfaat prasarana dalam suatu wilayah/kawasan pada suatu waktu tertentu. Keseimbangan antara keduanya akan mampu mengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas(Diwiryo, 1996).

Menurut Komaruddin, bahwa tujuan pembangunan prasarana pada permukiman adalah :

1. Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, dan derajat serta martabat masyarakat penghuni permukiman yang sehat dan teratur.

2. Mewujudkan kawasan kota yang ditata lebih baik sesuai dengan fungsinya dalam rencana tata ruang kota yang bersangkutan.
3. Mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien dengan pembangunan rumah susun, meningkatkan tertib bangunan, memudahkan penyediaan prasarana dan fasilitas lingkungan permukiman yang diperlukan serta mengurangi kesenjangan ekonomi penghuni dari berbagai kawasan di daerah perkotaan.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan sarana dan prasarana adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat dengan memanfaatkan prasarana yang ada secara optimal sesuai fungsinya.

### **C. Komponen Dasar Prasarana Lingkungan Permukiman**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2009, bahwa Prasarana Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Jaringan Jalan
2. Jaringan saluran Pembuangan air limbah
3. Jaringan Saluran Pembuangan air hujan (drainase)
4. Tempat Pembuangan sampah

Menurut Dirjen Cipta Karya, elemen prasarana dasar lingkungan perumahan adalah :

1. Jalan lingkungan
2. Jalan setapak

3. Sistem drainase
4. Penyediaan air bersih
5. Pengumpulan dan pembuangan sampah
6. Fasilitas penyehatan lingkungan (MCK)

Menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development* prasarana kota meliputi penyediaan air dan fasilitas limbah, drainase air permukaan, jalan raya, media transportasi, jaringan distribusi energi, fasilitas telekomunikasi dan jaringan pelayanan lainnya. Secara lebih rinci komponen dari prasarana perkotaan terdiri dari:

1. air bersih,
2. drainase,
3. saluran air pembuangan,
4. persampahan,
5. jalan kota,
6. jaringan listrik, dan
7. jaringan telepon

Dari jenis-jenis prasarana di atas maka prasarana telekomunikasi, listrik, air bersih sistem perpipaan dan air limbah sistem pengolahan terpusat, biasanya dikelola langsung oleh instansi pemerintah atau badan pengelola khusus karena membutuhkan teknologi tinggi dan biaya yang besar. Mengenai prasarana air bersih non perpipaan serta air limbah sistem pengolahan setempat biasanya dikelola oleh warga secara individu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri.

Prasarana yang dikelola oleh masyarakat merupakan prasarana yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat dan pengoperasian serta pemeliharannya yang sesuai dengan kemampuan masyarakat, prasarana tersebut yaitu:

1. Prasarana Jalan yaitu Jalan Lokal Sekunder Tipe I dan II, masyarakat bertanggung jawab untuk mengelolanya.
2. Prasarana Drainase yaitu saluran di sepanjang kiri kanan jalan dan berhubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari, dan masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan memeliharanya. Rendahnya kinerja saluran akan mengakibatkan genangan yang berpengaruh langsung pada aktifitas masyarakat dan kondisi lingkungan.
3. Prasarana pembuangan sampah yaitu mulai dari pembuangan sampah pada tempat yang telah disediakan sampai pengumpulan di tempat pembuangan sementara yang ada di lingkungan tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas, maka komponen prasarana dan sarana permukiman dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Komponen yang memberikan input kepada penduduk, yaitu prasarana air bersih dan listrik.
2. Komponen yang mengambil output dari penduduk, yaitu prasarana drainase, pembuangan air kotor/sanitasi dan pembuangan sampah.

3. Komponen yang dapat dipakai untuk memberi input maupun mengambil output, yaitu meliputi prasarana jalan dan telepon.

#### **D. Pengertian Sarana Permukiman**

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat mencapai maksud dan tujuan(Kamus Besar Bahasa Indonesia,1997).

Menurut Kementerian Perumahan Rakyat sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

Budiharjo, 1993 menyatakan bahwa yang paling sering terabaikan padahal sangat penting artinya bagi kelayakan hidup manusia penghuni lingkungan perumahan adalah sarana, yang meliputi:

1. Pelayanan Sosial(*social services*), seperti: sekolah, klinik dan Puskesmas serta rumah sakit yang disediakan pemerintah.
2. Fasilitas Sosial(*social facilities*), seperti tempat peribadatan, gedung pertemuan, lapangan olahraga, tempat bermain atau ruang terbuka, pertokoan, pasar, warung, dan sebagainya.

#### **E. Kawasan Permukiman dan Perumahan**

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dikatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman,

pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Dalam undang-undang yang sama, dikatakan bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1992, bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan hutan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan memberikan peluang terciptanya berbagai aktivitas untuk melakukan penataan, perencanaan dan pengaturan yang dapat dikelola secara optimal.

Permukiman merupakan kawasan lingkungan dimana manusia menetap dengan prasarana lingkungan, utilitas dan fasilitas sosial, serta difungsikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas(Jayadinata,1992).

Menurut SNI 03-1733-2004 V2 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan disebutkan bahwa kawasan permukiman adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi utama untuk permukiman.

Istilah Permukiman dalam *The Habitat Agenda Indonesia* disebutkan bahwa permukiman merupakan kesinambungan ruang kehidupan dari seluruh unsurnya, baik yang alami maupun non alami, yang mendukung dan melindungi, secara fisik, sosial dan budaya. Keanekaragaman kondisi *sosio-budaya*, *sosio-ekonomi*, dan fisik serta dinamika perubahannya, akan menjadi dasar pertimbangan utama pengelolaan dan pengembangan permukiman untuk dapat saling bersinergi secara sosial maupun fungsional, agar semua orang dapat hidup secara lebih sejahtera dan saling menghormati, mempunyai akses terhadap prasarana dasar dan pelayanan permukiman yang sesuai secara berkeadilan, dan mampu memelihara serta meningkatkan kualitas lingkungannya.

Permukiman adalah suatu kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan (Soedarsono, 2001).

Pemukiman sering disebut perumahan, pemukiman berasal dari kata *housing* dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata *human settlement* yang artinya pemukiman. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan menitikberatkan pada fisik, yaitu *houses* dan *land settlement*. Pemukiman memberikan kesan tentang pemukim atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya

di dalam lingkungan sehingga pemukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bersifat non fisik/benda mati yaitu manusia (*human*). Perumahan dan pemukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan erat hubungannya, pada hakikatnya saling melengkapi (Kurniasih, 2007).

Sedangkan Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (PP No. 26, 2008).

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

#### **F. Kawasan Permukiman Prioritas**

Kawasan permukiman prioritas adalah bagian dari suatu wilayah administrasi pemerintahan yang memiliki karakteristik dan atau persoalan khusus yang menyebabkan kawasan ini perlu diprioritaskan atau diberikan perhatian khusus dalam penanganannya. Salah satu tindakan prioritas yang dapat ditempuh adalah rehabilitasi kawasan permukiman dan pembangunan prasarana dan sarana. Kesalahan mengantisipasi pola penanganan dan pemberian prioritas pada kawasan dengan kebutuhan

khusus tersebut akan berdampak terhadap proses dan capaian tujuan pembangunan perkotaan secara keseluruhan. Dalam konteks suatu wilayah atau kota, kawasan permukiman prioritas tersebut dapat berupa:

1. Kawasan permukiman dan lingkungan perumahan kumuh dalam areal perkotaan atau perdesaan yang bernilai ekonomis atau strategis tinggi, yang apabila ditangani dapat meningkatkan nilai kawasan serta memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian wilayah atau kota yang bersangkutan.
2. Kawasan permukiman yang dilengkapi dan disertai dengan fungsi khusus dalam skala pembangunan wilayah kota atau wilayah yang lebih luas, seperti kawasan pariwisata, kawasan konservasi kultural, kawasan agro industri, dan sejenisnya.
3. Kawasan perdesaan yang berada dipinggiran areal perkotaan, dan berfungsi sebagai penyangga bagi kota induknya.
4. Kawasan permukiman yang potensial terkena bencana alam maupun konflik sosial yang perlu diselesaikan segera agar program lain dapat diselenggarakan pada waktunya.

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas(RPKPP) ini adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan kota/kabupaten dalam penyusunan RPKPP sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman prioritas di kota/kabupaten.

2. Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses rencana Pembangunan kawasan permukiman prioritas melalui pendekatan partisipasi masyarakat(*community participatory approach/CPA*).
3. Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat operasional pada kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan di kota/kabupaten.
4. Ditetapkan kawasan-kawasan prioritas dengan permasalahan dan potensi yang berpengaruh terhadap Pembangunan kota.
5. Tersedianya rencana aksi program penanganan strategis dan berdampak luas pada penyelesaian persoalan pembangunan

## **G. Prasarana Permukiman**

### **1. Jalan**

#### **a. Definisi Jalan**

Jalan adalah Lajur tanah yang disediakan khusus untuk sarana dan prasarana perhubungan darat yang dibuat sedemikian rupa untuk melayani kelancaran arus lalu lintas. Sarana dan prasarana perhubungan tersebut meliputi semua bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi pelayanan arus lalu lintas, guna untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain(Undang-Undang Jalan Raya No.13, 1980).

## **b. Klasifikasi Jenis Jalan Lingkungan Perumahan**

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 03-1733-2004) tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, terdapat lima macam klasifikasi jenis jalan untuk lingkungan perumahan yaitu:

### 1. Jalan lokal sekunder I

Jalan lokal sekunder I merupakan jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, kendaraan bermotor baik roda dua, tiga dan empat dengan lebar perkerasan jalan 7 m, dilengkapi bahu jalan 2 m, lebar trotoar 1,50 m dan lebar drainase 0,50 m.

### 2. Jalan lokal sekunder II

Jalan lokal sekunder II merupakan jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki dan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, serta memiliki lebar perkerasan jalan 5 hingga 6 m, dilengkapi dengan bahu jalan lebar 1,50 m, trotoar 1,50 m dan drainase 0,50 m.

### 3. Jalan lokal sekunder III

Jalan lokal sekunder III merupakan jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki dan kendaraan bermotor baik roda dua atau roda tiga dengan lebar perkerasan jalan 3 m dilengkapi bahu jalan dengan lebar minimal 0,50 m, lebar trotoar 1,20 m, dan drainase 0,50 m.

### 4. Jalan Lingkungan I

Jalan lingkungan I merupakan jalan yang diperuntukkan hanya

untuk pejalan kaki dengan memiliki lebar perkerasan jalan 2 m, bahu jalan lebar minimal 0,50 m, dan lebar drainase 0,50 m.

#### 5. Jalan lingkungan II

Jalan lingkungan II sama halnya dengan jalan lingkungan I yaitu jalan yang diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki dan memiliki lebar perkerasan jalan minimal 1,20 m, dan dilengkapi bahu jalan lebar minimal 0,50 m, dan lebar drainase 0,50 m.

## 2. Air bersih

### a. Pengertian Air Bersih

Air sebagai salah satu faktor terpenting bagi kehidupan dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Air bersih dikatakan bersih jika memiliki beberapa kriteria dan syarat-syarat sebagai berikut: jernih, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk keperluan minum, memasak, mandi dan energi(Darmawan, 2003).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Air bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Air bersih harus memiliki persyaratan dari segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologis dan radiologis. Sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping.

## **b. Sumber Air Bersih**

Menurut Robert J. Kodoatie, sumber air bersih umumnya terdiri dari dua macam sumber air, yaitu:

1. Air permukaan, merupakan sumber air baku yang berasal dari sungai, danau dan waduk.
2. Air tanah atau mata air merupakan sumber air yang berasal dari pemunculan air dari dalam tanah ke permukaan.

## **c. Standar Pelayanan Minimal Air bersih**

Berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) bidang permukiman dan pengembangan wilayah tahun 2000, pelayanan air bersih secara kualitas harus memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 tahun 1990, dengan parameter penilaian secara umum sebagai berikut:

1. Fisika, terdiri atas bau, jumlah zat pada terlarut, kekeruhan, rasa suhu dan warna
  2. Kimia, terdiri atas kimia organik dan anorganik
  3. Mikrobiologi, terdiri atas kandungan *koliform* tinja dan total *koliform*.
  4. Radioaktivitas, terdiri atas kandungan aktifitas *alpha* dan *beta*
- Sesuai dengan SPM 2000 terhadap pelayanan air bersih berkualitas, ditetapkan sesuai tingkatan ukuran kota, yaitu:
- a. Kota Metropolitan (> 1 juta penduduk), memiliki cakupan pelayanan 65-75% tingkat konsumsi 190-220 Lt/orang/hari.

- b. Kota besar(500 ribu – 1 juta penduduk), memiliki cakupan pelayanan 60-70% ,tingkat konsumsi 150-170 Lt/orang/hari.
- c. Kota sedang/kecil(< 500 ribu penduduk), memiliki cakupan pelayanan 55-65% , tingkat konsumsi 110-130 Lt/orang/hari.

### **3. Jaringan Drainase**

#### **a. Pengertian Drainase**

Drainase memiliki arti yaitu: mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal(Supirin,2004). Drainase merupakan salah satu faktor pengembangan irigasi yang berkaitan dalam pengolahan banjir.

#### **b. Fungsi dan Kegunaan Saluran Drainase**

1. Mengeringkan daerah becek dan genangan air
2. Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.
3. Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan
4. Mengendalikan air hujan termasuk banjir.

#### **c. Jenis-Jenis Drainase**

Menurut Djojonegoro(1997) jenis saluran drainase atau saluran pembuangan terdiri atas tiga jenis, yaitu:

1. Drainase primer, yaitu saluran utama yang menampung aliran dari saluran sekunder dengan dimensi saluran lebih besar.
2. Drainase sekunder, saluran terbuka atau tertutup yang menampung air dari saluran tersier, dimensi dari saluran sekunder tergantung debit yang dialirkan.
3. Drainase tersier, saluran terkecil dengan menerima air dari persil rumah, fasilitas umum dan sarana lainnya.

Berdasarkan konstruksinya jenis drainase terbagi atas dua, yaitu:

1. Saluran terbuka, adalah saluran yang lebih cocok untuk drainase air hujan yang terletak di daerah yang mempunyai luasan yang cukup, ataupun untuk drainase air non air hujan yang tidak membahayakan kesehatan atau lingkungan.
2. Saluran tertutup, adalah saluran yang pada umumnya sering dipakai untuk aliran air kotor.

Untuk saluran yang terletak di tengah kota, jenis drainase berdasarkan sejarah terbentuknya dibedakan atas dua macam, yaitu:

1. Drainase alamiah(*natural drainage*) adalah drainase yang telah terbentuk secara alamiah atau terbentuk dengan sendirinya dan tidak terdapat bangunan penunjang seperti bangunan pelimpah atau gorong-gorong. Saluran ini terbentuk dari terusan air yang bergerak karena gravitasi yang membentuk jalan air.
2. Drainase buatan(*artificial drainage*) adalah drainase yang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu, sehingga memerlukan

bangunan-bangunan khusus seperti selokan pasangan batu atau beton, gorong-gorong, pipa dan sebagainya.

#### **d. Sistem Penyediaan Jaringan Drainase**

Sistem penyediaan jaringan drainase ada empat macam, yaitu:

1. Sistem drainase utama, adalah sistem drainase perkotaan yang melayani kepentingan sebagian besar warga masyarakat kota.
2. Sistem drainase lokal, adalah sistem drainase perkotaan yang melayani kepentingan sebagian kecil warga masyarakat kota.
3. Sistem drainase terpisah, adalah sistem drainase yang mempunyai jaringan saluran pembuangan terpisah untuk air permukaan atau air limpasan
4. Sistem gabungan, adalah Sistem drainase yang mempunyai jaringan saluran pembuangan yang sama, baik untuk air genangan atau air limpasan yang telah diolah.

#### **e. Standar dan Kebijakan Jaringan Drainase**

Berdasarkan Keputusan Menteri PU Nomor 20 tahun 1986, terdapat beberapa penjelasan tentang pemahaman tentang saluran pembuangan air hujan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air hujan dengan kapasitas tampung yang cukup, sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan air.

2. Sistem pembuangan air hujan harus dihubungkan dengan badan penerima yang dapat menyalurkan dan menampung air buangan sedemikian rupa sehingga maksud pengeringan dapat tercapai.
3. Saluran pembuangan air hujan dapat merupakan saluran yang terbuka atau tertutup. Saluran terbuka  $\frac{1}{2}$  lingkaran dengan diameter minimal 20 cm, kemiringan saluran minimum 2% dan dengan kedalaman saluran minimum 40 cm.
4. Untuk saluran tertutup, setiap perubahan arah harus dilengkapi dengan lubang pemeriksa dan pada saluran yang lurus harus di tempatkan lubang pemeriksa pada jarak minimum setiap 50 cm. Hal ini untuk memudahkan operasi dan pemeliharaan saluran. Kemiringan saluran minimum 2% dan kedalaman minimum 30%. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimum bidang permukiman dan pengembangan wilayah Tahun 2000 terhadap saluran air perkotaan, telah ditetapkan panjangnya 120-250 m/ha dan lebar 0,3-1 m.

#### **4. Sanitasi(MCK dan Persampahan)**

##### **a. MCK(Mandi, Cuci, Kakus)**

Mandi, Cuci, Kakus(MCK) adalah aktivitas harian manusia yang menghasilkan air limbah rumah tangga, yaitu air bekas buangan yang pada tempat tertentu, kehadirannya tidak dikehendaki lingkungan karena tidak dapat dipergunakan lagi untuk tujuan semula, karena mengandung

kotoran manusia(tinja) atau berasal dari aktifitas dapur, kamar mandi dan cuci, dan tingkat kuantitasnya antara 50-70% dari rata-rata pemakaian air bersih dan dalam konsentrasi tertentu dapat berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia sehingga dilakukan penanganan terhadap limbah. Untuk mengetahui tipikal kuantitas dan karakteristik dari limbah rumah tangga, maka dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel.1. Tipikal kuantitas dan karakteristik limbah rumah tangga

Limbah/Produk	Q Liter /Orang/hari	Minyak dan Lemak (mg/liter)
Tinja	0,15	
Air Kencing	1,25	
Pembersih Anus	12-48	
Air Guyur	20-30	
Grey Water	90-120	
Kamar mandi		37-78
Cucian Pakaian		8-35
Dapur		100

Sumber : Kujawa, 2005

Mandi Cuci Kakus( MCK) yang peruntukannya untuk masyarakat umum dibutuhkan untuk masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus pribadi, dengan jarak pencapaian kurang dari 50 m dan terletak pada lokasi permukiman yang padat penduduk (Pengembangan Prasarana Perdesaan/P2D,2002).

Komponen Mandi Cuci Kakus(MCK) terdiri dari:

1. Ruang MCK (bilik untuk mandi, cuci dan buang air besar)
2. Pengolahan limbah yang terdiri dari: tangki septik , *anaerobik bafel* reaktor , resapan dan lahan basah buatan
3. Sumber air bersih (termasuk water toren)
4. listrik untuk lampu penerangan dan pompa listrik
5. Pada kondisi tertentu MCK bisa diberi pagar.

Kebutuhan bilik/ruang pada MCK dapat ditentukan berdasarkan jumlah pemakai. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah pengguna MCK dan bilik yang diperlukan

Jumlah Pemakai	Jumlah Bilik/ruangan		
	Mandi	Cuci	Kakus
10 - 20	2	1	2
21 - 40	2	2	2
41 - 80	2	3	4
81 - 100	2	4	4
101 - 120	4	5	4
121 - 160	4	5	6
161- 200	4	6	6

Sumber: Perencanaan Bangunan MCK Umum SNI 03-2399–2002

## **b. Persampahan**

Sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Sampah adalah sesuatu atau benda padat yang sudah tidak terpakai lagi dan telah dibuang. Notoatmodjo(1996),

Sampah rumah tangga adalah bagian terbesar dari sampah perkotaan yang berjumlah sekitar 60%. Sampah rumah tangga umumnya diklasifikasikan sebagai sampah basah dan sampah kering. Sampah basah sebagian besar bisa terurai secara alami dan berpotensi besar untuk kompos. Sampah ini umumnya berasal dari sisa makanan dan bekas pemangkasan tanaman.

### **1. Sumber Sampah**

Menurut Notoatmodjo berdasarkan sumbernya, sampah dapat dibedakan ke dalam beberapa sumber, yaitu:

- a. Sampah dari permukiman(*domestic waste*), terdiri dari bahan-bahan padat hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang seperti sisa makanan, pembungkus dan lain-lain.
- b. Sampah yang berasal dari tempat umum seperti pasar, tempat hiburan, terminal dan lain-lainnya.
- c. Sampah yang berasal dari instansi perkantoran, pendidikan, perdagangan, departemen maupun perusahaan.

- d. Sampah yang berasal dari jalan raya, terdiri dari; kertas, debu, kardus, batu-batuan, pasir, plastik, dedaunan dan sebagainya.
- e. Sampah yang berasal dari industri(*industrial waste*), adalah Sampah yang merupakan hasil proses industri, seperti sampah logam, pengepakan, dan lainnya.
- f. Sampah yang berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, yaitu; jerami, sisa sayuran dan lain sebagainya.
- g. Sampah yang berasal dari pertambangan seperti; batu-batu cadas, sisa-sisa pembakaran dan lain sebagainya.

## **2. Jenis Sampah berdasarkan sumbernya**

Menurut Notoatmodjo, sumber sampah dibedakan berdasarkan tiga jenis sampah, yaitu:

- a. Sampah yang berdasarkan zat kimia yang didalamnya terdiri dari sampah anorganik yang tidak dapat membusuk, seperti logam atau besi, pecahan kaca. Selain itu dikenal pula sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, daun-daun dan sebagainya.
- b. Sampah berdasarkan dapat dibakar atau tidak, terdiri dari sampah yang mudah terbakar seperti kertas, karet dan lainnya.

### 3. Standar Pembuangan Sampah

Berdasarkan Keputusan Menteri PU No. 20 tahun 1986, beberapa pemahaman tentang sampah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Setiap lingkungan harus dilengkapi sistem pembuangan sampah yang aman dan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kapasitas minimum tempat sampah rumah tangga didasarkan jumlah banyaknya buang sampah, yaitu 0,0012 m<sup>3</sup>/orang/hari.
- c. Tempat sampah rumah tangga dibuat dari bahan rapat air dan menempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh petugas kebersihan serta tidak mengganggu lalu lintas.
- d. Kapasitas tempat sampah lingkungan minimum memiliki volume 2 m<sup>3</sup> tiap 200 rumah terlayani.
- e. Tempat sampah lingkungan dibuat dari bahan rapat air dan diletakkan pada setiap jarak 100 m.
- f. Jangka waktu pengangkutan sampah dan tiap-tiap rumah diatur maksimal 2 hari sekali tetapi diusahakan pengangkutan dilakukan setiap hari.

Apabila belum tersedia tempat pembuangan sampah, maka setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah sesuai dengan persyaratan, berupa penimbunan (*open dumping, sanitary*), pembakaran, pabrik kompos. Berdasarkan SNI.S-04-1991-03, besaran timbulan sampah dibagi sebagai berikut:

- a. Rumah permanen, menghasilkan timbulan sampah 2,25-2,50 liter/org/hari dengan berat 0,35-0,40 kg/org/hari.
- b. Rumah semi permanen, menghasilkan timbulan sampah 2,00-2,25 liter/org/hari dengan berat 0,30-0,35 kg/org/hari.
- c. Rumah non permanen, menghasilkan timbulan sampah 1,75-2,00 liter/org/hari dengan berat 0,25-0,30 kg/org/hari.
- d. Kantor menghasilkan timbulan sampah 0,5-0,75 liter/org/hari dengan berat 0,025-0,10 kg/org/hari.
- e. Toko, menghasilkan timbulan sampah 2,50-3,00 liter/org/hari dengan berat 0,15-0,35 kg/org/hari
- f. Sekolah, menghasilkan timbulan sampah 0,10-0,15 l/org/hari dengan berat 0,01-0,02 kg/org/hari
- g. Pasar, menghasilkan timbulan sampah 0,10-0,15 l/org/hari dengan berat 0,01-0,02 kg/org/hari.

## **H. Sarana Lingkungan Permukiman**

### **1. Sarana Pendidikan**

#### **a. Taman Kanak-kanak**

Taman Kanak-kanak adalah sarana pendidikan untuk anak-anak usia lima hingga enam tahun. Satu kelas dapat menampung tiga puluh hingga empat puluh orang anak. Minimum penduduk pendukung sarana ini adalah 1000 penduduk dimana kanak-kanak usia lima hingga enam tahun jumlahnya sebesar delapan persen. Lokasinya di tengah-tengah

kelompok keluarga dan digabung dengan taman-taman tempat main di RT atau RW, Balai pengobatan, pertokoan di RW sehingga terjadi pengelompokan aktivitas untuk ibu-ibu. Radius pencapaian dari area yang dilayani diusahakan jangan lebih dari 500 m.

**b. Sekolah Dasar**

Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 1600 penduduk. Lokasinya sebaiknya tidak menyeberang jalan lingkungan dan masih tetap di tengah-tengah kelompok keluarga. Radius pencapaiannya maksimum 1000 m<sup>2</sup>.

**c. Sekolah Menengah Pertama(SMP)**

Sekolah Menengah Pertama adalah sekolah untuk anak-anak lulusan SD. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 4800 penduduk. Lokasinya digabung dengan lapangan olahraga dan dapat juga digabung dengan sarana-sarana pendidikan yang lain

**d. Sekolah Menengah Atas(SMA)**

Sekolah Menengah Atas adalah kelanjutan dari SMP. Di mana satu SMP sebaiknya dilayani oleh satu SMA yang terdiri dari enam kelas, masing-masing untuk tiga puluh murid. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 4800 penduduk. Lokasinya sama dengan SMP. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Pedoman standar pelayanan miniml(Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/KPTS/M/2001)

Bidang Pelayanan	Indikator	Cakupan	Tingkat Pelayanan	Kualitas
1. Sarana Niaga	Tingkat ketersediaan kebutuhan primer dan sekunder	Setiap kecamatan	Minimal tersedia satu pasar untuk setiap 30.000 penduduk	Mudah diakses
2. Sarana Pendidikan	Jumlah anak usia sekolah yang tertampung	Satuan wilayah kota Sedang/Kecil  Satuan Wilayah Kota Besar/ Metro	Minimal tersedia : 1 unit TK u/ setiap 1.000 penduduk  1 unit SD u/ setiap 6.000 penduduk  1 unit SLTP u/ setiap 25.000 penduduk  1 unit SLTA u/ setiap 30.000 penduduk  sama dengan kota sedang /kecil, tersedia 1 unit PerguruanTinggi u/ setiap 70.000 penduduk	Bersih, mudah dicapai, tidak bising, jauh dari sumber penyakit, sumber bau/sampah, dan pencemaran lainnya
1. Sarana Pelayanan Kesehatan	Sebaran fasilitas pelayanan kesehatan/ jangkauan pelayanan  Tingkat harapan Hidup	Satuan Wilayah Kabupaten/ Kota	Minimal tersedia : 1 unit BalaiPengobatan / 3000 jiwa  1 Unit BKIA/RS Bersalin/ 10.000-30.000 jiwa  1 unit Puskesmas/ 120.000 jiwa  1 unit Rumah Sakit/ 240.000/jiwa  Usia rata-rata penduduk 65-75 thn	Lokasi di pusat lingkungan/ kecamatan . bersih, mudahdicapai, tenang jauh dari sumber penyakit,bau/ sampah, dan pencemaran lainnya.
4. Sarana Sosial/ Budaya	Jangkauan pelayanan	Satuan wilayah Kab/Kota	Minimal Tersedia : 1 unit tempat Ibadah/ 2500 jiwa 1 unit Perpustakaan/ 1.000.000- 2.000.000 jiwa	Bersih, tenang, teduh, mudah dicapai

## **2. Sarana Kesehatan**

### **a. Balai Pengobatan**

Fungsi utama sarana ini adalah untuk memberikan pelayanan pencegahan dan penyembuhan tanpa perawatan, sehingga lokasinya harus terletak di tengah-tengah lingkungan keluarga dengan radius pencapaiannya tidak boleh lebih dari 1000 m. Minimum penduduk yang mendukung sarana ini adalah 3000 penduduk atau satu RW.

### **b. Balai kesejahteraan Ibu dan Anak(BKIA) + Rumah bersalin**

Fungsi utama sarana ini adalah untuk melayani ibu-ibu pada waktu sebelum dan sesudah melahirkan, serta anak-anak usia sampai dengan enam tahun. Lokasinya haruslah berada di tengah-tengah lingkungan keluarga dan diusahakan tidak menyeberang jalan lingkungan, dengan radius pencapaian 2000 meter. Dengan Minimum penduduk yang mendukung sarana ini adalah 10.000 penduduk (Empat RW).

### **c. Puskesmas Pembantu(PUSTU)**

Fungsi utama sarana ini adalah memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan(penyembuhan, pencegahan dan pendidikan). Lokasinya di tengah-tengah lingkungan keluarga, dengan radius pencapaiannya tidak boleh lebih dari 1000 meter. Minimum penduduk yang mendukung sarana ini adalah satu RW(Rukun Wilayah) atau 3000 penduduk.

#### **d. Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas),**

Fungsi utama sarana ini memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan(penyembuhan, pencegahan dan pendidikan) serta untuk memonitoring seluruh kondisi kesehatan di lingkungan. Lokasinya sebaiknya di pusat lingkungan dekat dengan pelayanan pemerintahan. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 30.000(satu lingkungan)

#### **e. Poliklinik**

Fungsi utamanya sama dengan Puskesmas di Lingkungan hanya skala usahanya lebih luas termasuk koordinasi puskesmas-puskesmas di Lingkungan. Lokasinya di pusat kecamatan atau di tempat-tempat yang khusus disediakan untuk sarana ini. Minimum yang mendukung sarana ini adalah 120.000 penduduk(satu kecamatan).

#### **f. Rumah Sakit Wilayah**

Fungsi utama sarana ini memberikan pelayanan medis kepada penduduk, baik sebagai pasien luar maupun pasien menetap(Kuratif, Preventif dan edukatif). Rumah sakit ini sebaiknya tersebar di setiap wilayah dengan dikoordinasi oleh sebuah Rumah Sakit Umum Pusat(RSUP).Lokasinya tidak usah dikelompokkan dengan pusat-pusat wilayah tetapi dipilih daerah yang cukup tenang dan mempunyai radius yang merata dengan daerah yang dilayaninya.Minimum penduduk pendukung adalah 240.000 penduduk.

#### **g. Tempat Praktek Dokter**

Tempat praktek dokter adalah salah satu sarana yang tidak dapat dipisahkan dari area perumahan. Lokasi tempat praktek dokter ini harus di tengah-tengah kelompok keluarga. dan didukung oleh 5000 penduduk.

#### **h. Apotik**

Fungsi utama Apotik untuk melayani penduduk di dalam bidang obat-obatan. Lokasinya sebaiknya tersebar di antara kelompok keluarga dan terletak di pusat-pusat RW atau pusat lingkungan. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 10.000 penduduk.

### **3. Sarana Perekonomian**

#### **a. Warung**

Fungsi utama warung adalah menjual barang-barang keperluan sehari-hari(sabun, gula, teh, rempah-rempah dan lain-lain). Lokasinya terletak di tempat pusat lingkungan yang mudah dicapai dan mempunyai radius maksimum 500 meter. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 250 penduduk.

#### **b. Pertokoan**

Fungsi utama sarana ini adalah menjual barang-barang keperluan sehari-hari berupa toko-toko. Lokasinya terletak di pusat kota dan tidak menyeberang jalan lingkungan. Minimum jumlah penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 2500 penduduk.

### **c. Pusat Perbelanjaan Kawasan 30.000 Penduduk**

Fungsi utama sebagai pusat perbelanjaan di lingkungan yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, pakaian, barang-barang klontong, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Terdiri dari pasar dan toko-toko lengkap dengan bengkel reparasi elektronik dan sepeda motor. Lokasinya pada jalan utama lingkungan dan mengelompok dengan pusat lingkungan. Mempunyai terminal kecil untuk pemberhentian kendaraan. Minimum penduduk pendukung sarana ini adalah 30.000 penduduk.

### **d. Pusat Perbelanjaan dan Niaga Kawasan 120.000 Penduduk**

Sebagai pusat perbelanjaan lingkungan, dilengkapi sarana-sarana niaga lainnya seperti kantor-kantor, bank, industri kecil, dan lain-lain. Lokasinya mengelompok dengan pusat kecamatan, dan merupakan pangkalan transport umum untuk jenis angkutan penumpang kecil. Minimum penduduk yang mendukung sarana ini 120.000 penduduk.

## **4. Sarana Peribadahan**

Sarana peribadahan ini, meliputi jenis, macam dan besarnya sangat tergantung dari kondisi setempat, maka sebelumnya dilakukan survey tentang:

1. Struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin
2. Jenis agama/kepercayaan yang dianut
3. Cara atau pola melaksanakan agama/kepercayaan

Untuk agama Islam :

1. Penduduk 2.500(RW), disediakan 1 Musholla, luas =300 m<sup>2</sup>
2. Penduduk 30.000(Lingkungan);1 masjid Lingkungan = 1.750 m<sup>2</sup>
3. Penduduk 120.000(Kecamatan);1 masjid kecamatan = 4000 m<sup>2</sup>
4. Penduduk 1.000.000(Kotamadya); 1 masjid Kota.

### **I. Penelitian Terkait**

Penelitian terkait lebih dahulu dilakukan oleh Muhammad Nur Djadwi dari Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2011. Latar belakang dari penelitian terdahulu tersebut adalah permasalahan kondisi fisik lingkungan permukiman nelayan yang umum dijumpai, antara lain: Kondisi lingkungan permukiman kurang terpelihara, kualitas rumah penduduk masih rendah, sanitasi lingkungan permukiman kurang baik karena belum tersedianya saluran drainase, fasilitas MCK, dan penanganan sampah yang memadai serta ketersediaan air bersih yang belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk baik dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

Adapun tujuan penelitian terdahulu adalah untuk menganalisis tingkat ketersediaan prasarana dan sarana dasar pada permukiman nelayan di Kelurahan Binanga, Mamuju. Dari hasil penelitian terdahulu memberi kesimpulan bahwa tingkat ketersediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan pada permukiman nelayan di Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju, digolongkan dalam kategori kurang memadai. Adapun penelitian yang peneliti lakukan ini lokasi kelurahannya sama

dengan lokasi penelitian terdahulu namun kawasannya lingkungannya yang berbeda, Nur Dadjwi pada kawasan Kasiwa Tengah yang merupakan kawasan permukiman Nelayan yang letaknya di pesisir pantai dan adapun penelitian ini dilakukan di kawasan lingkungan Kasiwa Timur yang terletak di pusat kota kelurahan Binanga dan bersebelahan dengan pasar sentral lama.

## **J. Kerangka Pikir Penelitian**

Kerangka pikir adalah merupakan koseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. dengan tujuan untuk menjelaskan alur dan konsep pikir penelitian untuk mendapatkan tujuan dari penelitian ini. Latar belakang penelitian yang diteliti adalah terjadinya tingkat pertumbuhan penduduk kota yang lebih cepat dan tidak seimbang dengan ketersediaan lahan di perkotaan, mengakibatkan tekanan penggunaan lahan kota. Salah satunya ditandai dengan penggunaan lahan yang kurang atau tidak layak hunian untuk daerah permukiman. Keadaan yang demikian akan menimbulkan masalah tata ruang/lingkungan. Masalah permukiman perkotaan di Indonesia pada saat ini di antaranya adalah tempat tinggal serta lingkungan yang pada umumnya jauh dari syarat-syarat kehidupan keluarga yang layak.

Kota Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat mendapat prioritas tinggi untuk dikembangkan. Dalam Rencana Detail

Tata Ruang(RDTR) dijelaskan bahwa Kota Mamuju dengan fungsi utama sebagai jasa pelayanan pemerintahan, selain itu juga berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa perekonomian. Sebagai kota pusat pemerintahan, maka kawasan tersebut perlu didayagunakan secara optimal dan terpadu untuk mendukung perannya sebagai salah satu pusat kegiatan pemerintahan dalam wilayah Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat(Sulbar) dalam skala yang lebih luas.Salah satunya dengan cara pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dengan pembangunan kawasan permukiman prioritas di kabupaten Mamuju.

Selanjutnya dilakukan penelitian Ketersediaan Prasarana dan Sarana Lingkungan permukiman.Prasarana yang akan diteliti adalah: prasarana jalan, air bersih, Sanitasi(persampahan dan MCK) dan jaringan drainase. Sarana yang akan diteliti adalah: Sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan peribadahan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di kelurahan Binanga dan seberapa besar kebutuhan Prasarana dan Sarana Lingkungan untuk proyeksi beberapa tahun ke depan, untuk selanjutnya dapat dijadikan saran dan masukan bagi pemerintah setempat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pikir pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian